

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai organisasi bisnis, perusahaan memiliki beberapa faktor dari luar yang dapat mempengaruhi organisasi. Ada dua macam lingkungan luar, yaitu lingkungan tugas dan lingkungan umum (Situmorang, 2009). Lingkungan tugas adalah lingkungan yang memberikan pengaruh secara langsung terhadap organisasi, seperti pemilik, pemasok, pelanggan, dan serikat pekerja. Sedangkan lingkungan umum adalah lingkungan yang memberikan pengaruh yang tidak langsung terhadap organisasi. Salah satu lingkungan umum yang mempengaruhi organisasi bisnis adalah lingkungan politik.

Di negara-negara berkembang, koneksi politik merupakan hal yang umum dilakukan, salah satunya di Indonesia (Fisman, 2001). Di Indonesia, koneksi politik umumnya dilakukan dengan menempatkan seseorang yang memiliki hubungan dengan pemerintah ke dalam struktur organisasi perusahaan, baik sebagai direksi maupun komisaris. Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan memperoleh berbagai keuntungan. Salah satu keuntungan yang bisa didapat oleh perusahaan yang memiliki koneksi perusahaan adalah kemudahan dalam melakukan pinjaman. Selain itu, perusahaan juga memiliki keuntungan dalam hal perencanaan pajaknya. Perusahaan yang memiliki koneksi politik mendapat keuntungan berupa pemeriksaan pajak yang rendah.

Teori yang berkaitan dengan koneksi politik adalah teori *rent-seeking* atau pemburu rente. Praktik *rent-seeking* merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang

sebesar-besarnya tetapi dengan usaha yang sekecil-kecilnya. Berdasarkan teori tersebut, perusahaan yang memiliki koneksi politik akan memperoleh manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan. Jika dihubungkan dengan teori ini, maka perusahaan menempatkan seseorang yang memiliki hubungan dengan pemerintah ke dalam struktur organisasi perusahaan, baik sebagai direksi maupun komisaris untuk mendapatkan keuntungan dalam beberapa hal, termasuk perencanaan pajaknya. Koneksi yang dimiliki oleh perusahaan bisa berupa koneksi politik dan bisa juga berupa koneksi militer.

Menurut Harymawan (2018), kegiatan bisnis militer memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Perusahaan dapat dikatakan memiliki koneksi militer apabila terdapat eksekutif perusahaannya, baik dewan direksi maupun komisarisnya yang memiliki pengalaman dinas militer di Angkatan Udara, Angkatan Darat, Marinir, Angkatan Laut, atau pengalaman militer lainnya. Dewan direksi maupun komisaris yang memiliki latar belakang militer dapat menyebabkan para pengambil keputusan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuannya. Pengalaman militer biasanya berkaitan dengan sikap disiplin yang transparan dan menunjukkan adanya sikap kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga adanya pengalaman militer dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak dalam suatu perusahaan (Law dan Mills, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Law dan Mills (2017) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki direksi maupun komisaris dengan pengalaman militer memiliki strategi pajak yang kurang agresif dan menggunakan lebih sedikit *tax haven*. Perusahaan dengan eksekutif, dewan direksi, dan komisaris yang memiliki pengalaman militer memiliki pengaruh besar pada kebijakan pajak perusahaan dan lebih konservatif dalam perencanaan pajak. Eksekutif, dewan direksi, maupun komisaris dengan pengalaman militer biasanya menerapkan nilai-nilai yang terkait dengan peraturan pemerintah dan loyalitas kepada pemerintah. Dewan direksi maupun komisaris yang memiliki koneksi militer juga menilai penghindaran pajak adalah perbuatan yang tidak etis (Benmelech dan Frydman, 2015).

Koneksi politik dan militer yang dimiliki oleh perusahaan dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perpajakan, khususnya dalam hal penghindaran pajak. Pelaku bisnis biasanya menganut prinsip ekonomi bagaimana

mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya dengan menekan biaya yang sekecil-kecilnya. Meskipun bagi pemerintah pajak merupakan sumber penerimaan terbesar, namun bagi pelaku usaha pajak merupakan sesuatu yang tidak menguntungkan. Sesuatu yang tidak menguntungkan akan mendorong perilaku penghindaran atau perlawanan. Hal ini yang mendorong perusahaan memiliki keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

Perusahaan yang terhubung secara politik cenderung membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terhubung secara politik (Sudibyo dan Jianfu, 2016). Hal ini akan mengakibatkan penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah akan menurun. Koneksi politik juga dapat membantu mengurangi kemungkinan pemeriksaan pajak atau mengurangi sanksi pajak pada suatu perusahaan dengan memanfaatkan koneksi yang dimiliki dengan pemerintah (Lin dkk, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lin dkk (2018), mereka menemukan bahwa perusahaan yang memiliki direksi atau komisaris dengan pengalaman militer, memiliki uang tunai dan tarif pajak efektif GAAP yang lebih tinggi sebagai pengukuran yang paling luas dalam menangkap rangkaian kesatuan penuh dari perencanaan pajak perusahaan. Direksi atau komisaris ini juga mempertahankan cadangan yang lebih rendah tanpa memperhatikan manfaat pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang agresif dalam melakukan perencanaan pajaknya. Mereka juga menemukan bahwa pengalaman militer memiliki pengaruh besar pada kebijakan pajak perusahaan. Pengalaman militer biasanya memberikan nilai-nilai yang terkait dengan peraturan pemerintah dan loyalitas kepada pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan manajer dengan pengalaman militer kurang agresif dalam mengurangi beban pajak perusahaan.

Koneksi politik dan militer dapat terjadi pada perusahaan yang memiliki afiliasi maupun perusahaan yang tidak memiliki afiliasi. Perusahaan yang memiliki afiliasi memperoleh peluang yang lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak daripada perusahaan yang tidak memiliki afiliasi, terutama perusahaan yang memiliki afiliasi asing. Hal ini disebabkan karena adanya negara-negara *tax haven*, dimana negara tersebut menerapkan tarif pajak yang sangat rendah, sehingga memicu perusahaan-perusahaan multinasional melakukan investasi ke negara *tax haven*. Hal ini akan

menyebabkan adanya indikasi *transfer pricing* yang merupakan salah satu upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Praktik *transfer pricing* ini biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Menurut Suandy (2016: 76), perusahaan multinasional adalah perusahaan yang melakukan kegiatan operasionalnya melalui lintas batas antarnegara dan memiliki hubungan istimewa, baik akibat penyertaan modal saham, maupun pengendalian manajemen atau teknologi yang dapat berupa anak perusahaan, cabang perusahaan, agen, dan lain sebagainya yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Perusahaan multinasional dapat memanfaatkan hubungan internal antar anggota perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak globalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan *transfer pricing* ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Kegiatan pemindahan penghasilan dan biaya yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dapat menyebabkan kerugian terhadap negara karena dapat meminimalkan penghasilan pajak yang diterima oleh negara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sima dan Asri (2018), multinasionalitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin banyak suatu perusahaan multinasional memiliki cabang di luar negeri, semakin terpicu pula perusahaan tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Koneksi politik maupun koneksi militer yang dimiliki oleh perusahaan kurang berpengaruh terlalu signifikan terhadap penghindaran pajak apabila tidak didukung oleh kesempatan yang dimiliki oleh perusahaan multinasionalitas, maka dari itu penulis memilih perusahaan multinasional sebagai variabel moderasi.

Dari uraian di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh koneksi eksekutif perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan multinasionalitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2018.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun ada juga beberapa penelitian yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lin dkk (2018) mengatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudiby dan Jianfu (2016) juga mengatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian lain yang memiliki hasil yang sama adalah penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2014) yang mengatakan bahwa koneksi politik berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Butje dan Tjondro (2014) yang membahas mengenai pengaruh karakteristik eksekutif dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* juga menyebutkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap CETR sehingga perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian-penelitian tersebut bertentangan dengan beberapa penelitian yang mengatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Putri (2017). Di dalam penelitian ini ditemukan kesenjangan penelitian yang berupa perbedaan antara hipotesis yang dirumuskan dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan hipotesis dari peneliti yang merumuskan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan koneksi militer juga memiliki hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Law dan Mills (2017) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki eksekutif perusahaan dengan pengalaman militer memiliki strategi pajak yang kurang agresif dan menggunakan lebih sedikit *tax haven*.. Perusahaan dengan eksekutif perusahaan yang memiliki pengalaman

militer memiliki pengaruh besar pada kebijakan pajak perusahaan dan lebih konservatif dalam perencanaan pajak.

Menurut Suandy (2016: 6), pada umumnya dalam praktik bisnis pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Sehingga perusahaan sebagai Wajib Pajak akan melakukan perencanaan pajak dengan dengan merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang yang dikenal sebagai penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwa tidak semua Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajaknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Law dan Mills (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki eksekutif perusahaan dengan pengalaman militer memiliki strategi pajak yang kurang agresif. Perusahaan dengan eksekutif perusahaan yang memiliki pengalaman militer memiliki pengaruh besar pada kebijakan pajak perusahaan dan lebih konservatif dalam perencanaan pajak.

Berdasarkan beberapa kesenjangan yang ditemukan atas penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh koneksi eksekutif perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan multinasionalitas sebagai variabel moderasi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh koneksi militer terhadap penghindaran pajak.
2. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak.
3. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh perusahaan multinasional terhadap pengaruh koneksi militer perusahaan terhadap penghindaran pajak.
4. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh perusahaan multinasional terhadap pengaruh koneksi politik perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi eksekutif perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan perusahaan multinasional sebagai variabel moderasi. Ringkasan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Koneksi militer berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena pengalaman militer yang dimiliki eksekutif perusahaan berdampak pada karakteristik eksekutif tersebut dalam melakukan perencanaan pajaknya. Perusahaan dengan eksekutif yang memiliki pengalaman militer cenderung lebih taat peraturan dan loyal kepada pemerintah.
2. Koneksi politik berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan mengakibatkan perusahaan lebih memperhatikan kebijakan dan keputusan dalam melakukan perencanaan pajaknya. Hal ini dilakukan untuk tetap mendapatkan citra yang baik bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan selalu mengikuti berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
3. Perusahaan multinasional tidak dapat memoderasi pengaruh koneksi militer terhadap penghindaran pajak. Perusahaan multinasional yang memiliki koneksi militer pada perusahaannya akan tetap mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh direksi maupun komisaris. Direksi maupun komisaris yang memiliki latar belakang militer akan tetap mengutamakan kesetiaannya kepada pemerintah dengan kontribusi yang diberikan melalui setoran pajak yang besar.
4. Perusahaan multinasional tidak dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Multinasionalitas yang dimiliki oleh perusahaan tidak akan memengaruhi keputusan dari direksi maupun komisaris yang memiliki latar belakang politik. Direksi maupun komisaris yang memiliki latar belakang politik akan tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan citra yang baik bagi perusahaan, sehingga

multinasionalitas yang dimiliki oleh perusahaan tidak memengaruhi keputusan perencanaan pajak yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini menguraikan secara garis besar isi dari setiap bab untuk memberikan gambaran umum serta memudahkan pembaca untuk mempelajari dan memahami isi dari skripsi ini. Berikut ini adalah sistematika penulisan penelitian ini:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi mengenai gambaran secara menyeluruh mengenai latar belakang dan tujuan dilakukannya penelitian ini. Bab ini juga berisi tentang kesenjangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang mendasari penelitian ini seperti teori *rent seeking*, teori *upper echelon*, dan teori lainnya yang berkaitan dengan variabel penelitian yang dibahas dalam penelitian ini yaitu koneksi politik, koneksi militer, penghindaran pajak dan multinasionalitas. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi mengenai pengembangan hipotesis yang menguraikan hubungan antar variabel serta kerangka pemikiran.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Bab ini membahas identifikasi setiap variabel penelitian dan menjabarkan mengenai definisi operasional dari masing-masing variabel. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4: HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai subjek dan objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2018. Dalam bab ini juga di jelaskan hasil pengujian yang dilakukan dengan regresi linear moderasi.

BAB 5: PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya. Dalam bab ini juga berisi mengenai saran-saran untuk penelitian selanjutnya dan keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini.